

ANALISIS TATA KELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Dr. M. Bugis, M.Si
Bin Raudha A. Hanoeboen, SE.,ME

ABSTRAK

“Analisis Tata Kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah”. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Maluku Tengah

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 2004 sampai 2015 yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dan BPS Kabupaten Maluku Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa daerah yang sudah dikatakan berkembang apabila daerah tersebut secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan keuangannya dari pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan yang baik perlu diterapkan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Maluku Tengah masih sangat rendah dengan demikian ketergantungan terhadap pemerintah Pusat juga masih sangat tinggi, hal ini diperlihatkan dari perolehan DAU dan dana perimbangan yang masih besar. Untuk mensiasati hal tersebut maka perlu dilakukan tata kelola anggaran yang dapat dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan daerah yang berkembang dan berdiri sendiri.

Kata Kunci : Tata Kelola Anggaran, Desentralisasi Fiskal, Analisis SWOT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan yang baik perlu diterapkan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah untuk melayani kepentingan masyarakatnya. Penyusunan dan penetapan APBD merupakan sarana atau alat utama

dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dan proyek dalam suatu anggaran tertentu, serta sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran tersebut. Khususnya rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimana jumlah pendapatan yang dianggarkan dapat direalisasikan melebihi jumlah angrgan yang ditetapkan namun realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Maka dari itu diperlukan pula bantuan dari pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah.

Berikut disajikan data keuangan Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut:

Table A
Peran PAD dan DAU/DAK terhadap APBD

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	DAU	DAK	Anggaran Belanja Daerah
2004	401.256.061.000,00	8.091.655.000,00	330.745.000.000,00	12.680.000.000,00	401.256.061.000,00
2006	626.165.394.284,59	79.387.732.071,00	454.583.000.000,00	41.119.000.000,00	533.032.411.201,01
2007	623.219.118.279,01	14.897.763.841,31	500.035.000.000,00	46.201.500.000,00	524.541.730.935,00
2008	667.430.287.064,89	15.944.184.238,89	500.793.445.000,00	71.796.000.000,00	700.767.626.730,42
2009	615.561.677.000,00	15.665.429.000,00	437.596.185.000,00	59.930.000.000,00	719.585.536.000,00
2010	615.561.677.000,00	12.918.800.626,17	464.200.684.000,00	61.182.100.000,00	677.985.385.193,48
2011	795.668.202.330,82	10.927.908.704,82	548.484.621.228,00	58.641.800.000,00	779.271.351.281,12

2012	850.264.410.000,00	4.568.785.000,00	672.609.497.000,00	59.515.870.000,00	860.353.269.298,00
2014	1.046.079.376.235,56	50.996.215.566,56	848.638.632.000,00	97.814.830.000,00	1.093.199.614.920,20

Sumber: BPS Maluku Tengah

Tabel diatas memberi gambaran jelas bahwa kontribusi PAD Maluku Tengah masih rendah terhadap APBD. Kondisi ini masih jauh dari harapan, di mana kondisi ideal kontribusi PAD harus di atas 50% dari total penerimaan APBD. Sebaliknya, peranan dana alokasi pemerintah terhadap APBD justru meningkat. Hal ini mencerminkan masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Maluku Tengah. sehingga tujuan dari dana alokasi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah atau daerah dengan daerah belum sepenuhnya tercapai dengan menggali sumber-sumber penerimaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Maluku Tengah
2. Bagaimana strategi dan kebijakan pengelolaan Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Maluku Tengah
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Maluku Tengah dengan mempertimbangkan aspek kekuatan, kelemahan, serta peluang dan tantangan yang ada.

BAB II

Landasan Teoritis

A. Otonomi Daerah

Menurut Ketentuan Umum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

- *Desentralisasi*

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: 4 dan 220)

- *Desentralisasi Fiskal*

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, Op cit: 83)

- *Derajat Desentralisasi Fiskal*

Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat **Kapasitas Fiskal**

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 3, "Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil."

Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya). Semakin rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin lemah pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandiriannya).

B. Penerimaan Daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah dapat dibedakan atas penerimaan dari daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan dari sumbangan dan bantuan. (Suparmoko, 2002: 29)

a) Pendapatan Asli Daerah.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan pendapatan asli daerah selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian keuntungan perusahaan daerah, penerimaan lain-lain yang sah (Suparmoko, 2002: 29).

b) Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi daerah yang disalurkan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

c) Pinjaman daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD.

d) Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 173).

e). Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 173).

C. Pengeluaran Daerah.

Proses dan pengalokasian anggaran haruslah berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti bahwa proses penyusunan anggaran hendaknya melibatkan banyak pihak dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya.

Pengeluaran anggaran (*budget expenditure*) dibedakan atas belanja rutin (*recurrent expenditure*) dan belanja modal (*capital expenditure*). Belanja rutin dapat diartikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya terus menerus, sedangkan belanja pembangunan merupakan pengeluaran yang sifatnya tidak terus menerus dan ada batasnya.

D. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Aspek sumber daya manusia (SDM) adanya kemampuan aparat pengelola walaupun belum

memadai dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tiap unit/satuan kerja daerah tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

E. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Daerah.

Prinsip didalam penyusunan anggaran harus berorientasi pada hal – hal sebagai berikut:

- Keadilan Anggaran
- Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran
- Anggaran Berimbang Dan Defisit
- Disiplin Anggaran
- Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

F. Analisis SWOT

Menurut Wikipedia, analisis SWOT (singkatan Bahasa Inggris) Kekuatan/*Strengths*, Kelemahan/*Weaknesses*, Kesempatan/*Opportunities* dan Ancaman/*Threats* adalah rencana perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau kinerja bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari setiap proyek atau kinerja bisnis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut Gitosudarmo (2001: 115) Kata SWOT merupakan pendekatan dari *Strengths*, *Weakness*, *Opportunity*, and *Threats*, yang dapat diterjemahkan menjadi : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Dalam metode atau pendekatan ini kita harus memikirkan tentang kekuatan apa saja yang dimiliki, kelemahan apa saja yang melekat pada diri atau struktur organisasi kemudian juga harus melihat kesempatan atau *opportunity* yang terbuka dan akhirnya harus mampu untuk mengetahui ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan (AGHT)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, pengeluaran pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, terdiri dari pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Maluku Tengah.

B. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengambilan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Maluku serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah, serta instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

C. Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Analisis derajat otonomi fiscal. (kuncoro 1995 : 9)

$$\text{Derajat Desentralisasi Fisika} = \frac{PAD}{TPD} \times 100$$

Dimana :

PAD : Penerimaan PAD selama satu tahun

TPD : Jumlah keseluruhan penerimaan daerah

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh gambaran situasi strategis dari sebuah Unit Kerja Ekonomi (UKE). Kekuatan UKE merupakan segala sesuatu yang menjadikan UKE memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya dengan baik sehingga tujuan UKE tercapai (Mardiasmo dan Makhfath, 2000:36).

Menurut Rangkuti (2000 :21-25) tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap analisis yaitu:

1. Tahapan pengumpulan data.
2. Tahap analisis.
3. Tahap pengambilan keputusan.

Model yang dipakai pada tahap ini yaitu matrik faktor strategi eksternal (*EFAS*), matrik faktor strategi internal (*IFAS*) dengan sistem pembobotan terhadap masing-masing aspek dengan cara :

1. terlebih dahulu membuat prioritas dari yang pengaruhnya dianggap paling kuat ke yang paling lemah;
2. menentukan persentase bobotnya dari masing-masing aspek yang antara lain:
 - a. Aspek kekuatan dan kelemahan sebagai aspek yang dilihat dari dalam (internal)
 - b. Aspek peluang dan ancaman yaitu aspek yang dilihat dari luar (eksternal).

Persentase pembobotan, diberikan nilai bobot yang sama untuk analisis SWOT keadaan awal. Analisis SWOT yang diberikan bobot didasarkan atas daftar pertanyaan atau kuesioner yang disetujui dari responden yang mau menjawab pertanyaan dan telah menyerahkan daftar pertanyaan tersebut.

Setelah masing-masing aspek dibobot, selanjutnya diadakan penilaian dengan menggunakan hasil identifikasi SWOT seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Sistem Pembobotan SWOT

Aspek Internal atau Eksternal	Nilai	Rating	Bobot	Skor Tertimbang
Faktor Kunci sukses	Sangat kuat, kuat, lemah, paling lemah.	4 sampai 1	Persentase tersetujui	Rating x bobot
			Total	Skor total

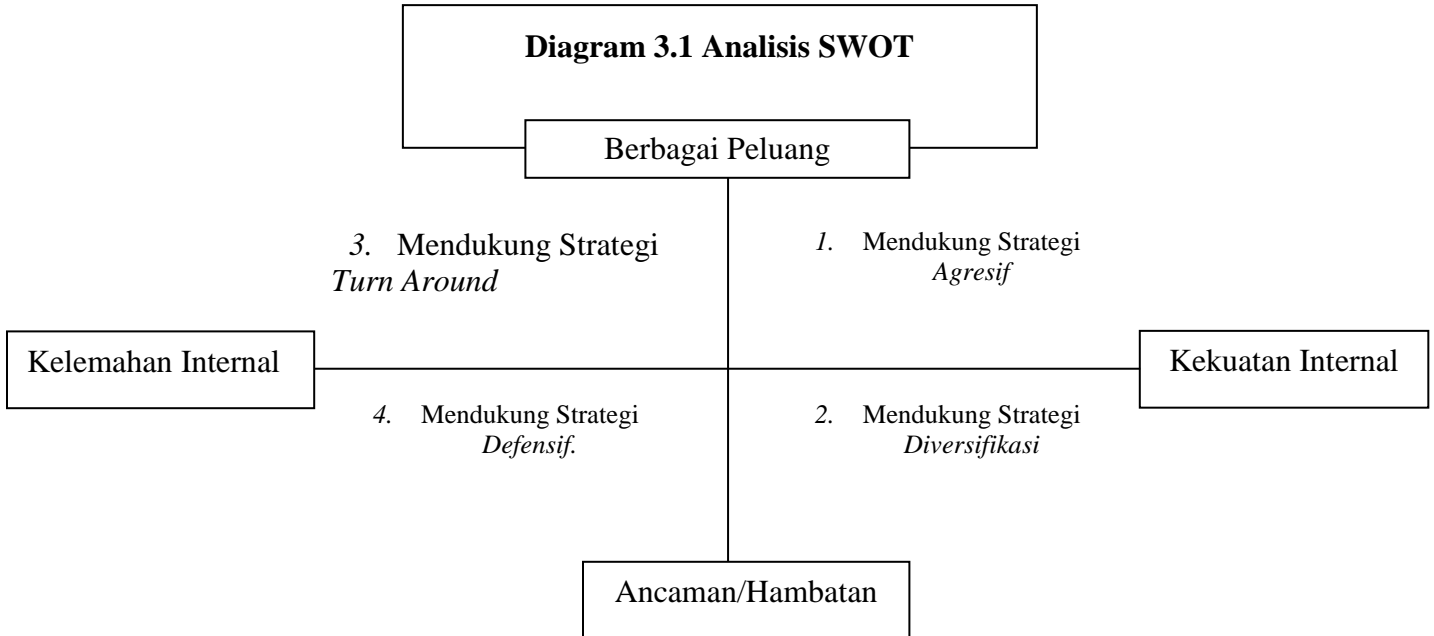
Sumber : Rangkuti (2000 :23-25)

Langkah seterusnya dibentuk diagram analisis SWOT dengan cara pembobotan terhadap variabel-variabel terukur (aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Posisi pada koordinat merupakan total skor tertimbang hasil dari :

1. \sum skor tertimbang aspek kekuatan - \sum skor tertimbang aspek kelemahan;

2. \sum skor tertimbang aspek peluang - \sum skor tertimbang aspek ancaman.

Aspek internal (SW) pada sumbu horizontal dan aspek eksternal (OT) pada sumbu vertikal, sehingga dapat diketahui letak dari obyek yang dikaji di dalam peta tersebut dapat dilihat pada diagram 3.1 Analisis SWOT dibawah ini:



Sumber : Rangkuti. F. 2000

Strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dipergunakan matrik SWOT yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, berdasarkan hasil perhitungan dalam diagram analisis SWOT. Hal ini dapat dilihat pada diagram 3.2 Matriks SWOT berikut :

Table 3.2 Matriks SWOT

<i>EFAS</i> \ <i>IFAS</i>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Strategi <i>SO</i> Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi <i>WO</i> Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Ancaman (T)	Strategi <i>ST</i> Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi <i>WT</i> Atasi kelemahan mencegah ancaman

Sumber : Rangkuti. F. 2000

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Kemampuan keuangan daerah mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu daerah

dalam menjalankan otonomi di daerahnya. Jika kemampuan keuangan daerahnya sangat baik maka pelaksanaan otonomi di daerah tersebut berhasil dilaksanakan. Sebaliknya apabila ketergantungan fiskalnya sangat tinggi maka daerah tersebut kurang berhasil dalam melaksanakan otonomi di daerahnya. Untuk mengetahui kemampuan keuangan

daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan menghitung derajat desentralisasi fiskal. Berikut ini disajikan data derajat desentralisasi

Kabupaten Maluku Tengahkurun waktu sebelas tahun sebagai berikut:

Tabel 4.1
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2001-2010 (Dalam Persen)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah 1	TPD (total penerimaan daerah) 2	DDF (%) 3	Kemampuan Keuangan 4
2004	8.091.655.000,00	401.256.061.000,00	2,01	SK
2006	79.387.732.071,00	626.165.394.284,59	12,67	K
2007	14.897.763.841,31	623.219.118.279,01	2,39	SK
2008	15.944.184.238,89	667.430.287.064,89	2,38	SK
2009	15.665.429.000,00	615.561.677.000,00	2,54	SK
2010	12.918.800.626,17	615.561.677.000,00	2,09	SK
2011	10.927.908.704,82	795.668.202.330,82	1,37	SK
2012	4.568.785.000,00	850.264.410.000,00	0,53	SK
2014	50.996.215.566,56	1.046.079.376.235,56	4,87	SK

(Sumber: Data Olahan, 2016)

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Maluku Tengah masih sangat rendah, bahkan tidak ada peningkatan yang berarti. Hal ini terlihat dari tahun ke tahun selama 2004 - 2014 mengalami penurunan besar hal ini dikarenakan banyak pajak – pajak baru bagi daerah yang dapat dikembangkan dan membawa dampak positif pada kenaikan derajat desentralisasi fiskal belum dapat diolah secara lebih maksimal.

Pada tahun 2004 total Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 8.091.655.000,00 dan total penerimaan 401.256.061.000,00 memperoleh hasil Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 2,01%, yang termasuk dalam rasio antara 0,00% sampai dengan 10% dikategorikan kriteria Sangat Kurang (SK). Pada

tahun 2006 hasil Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 12,67% yang meningkat 10,66% dari tahun sebelumnya dan dikategorikan kriteria Sangat Kurang (K). Kemudian pada tahun 2007 kondisi kembali menurun ke angka 2,39%, dan kembali masuk dalam kategorikan kriteria Sangat Kurang (SK). Kategori kriteria sangat kurang (SK) terus berlanjut dari tahun 2008 yang menurun menjadi 2,38% (SK), tahun 2009 meningkat sedikit menjadi 2,54% (SK), dan kembali menurun pada tahun 2010 menjadi 2,09% (SK), begitu pula pada tahun 2011 yaitu 1,37% (SK), dan tahun 2012 menurun lagi menjadi 0,53% (SK).

Berikut adalah jumlah total dana perimbangan yang di berikan pemerintah pusat kepada kabupaten / kota Provinsi Maluku.

Table 4.2
Jumlah Total Dana Perimbangan Kabupaten / Kota Provinsi Maluku.

Tahun	Kabupaten/Kota	Jumlah Dana Perimbangan
2014	Maluku Tengah	Rp 989.281.848.169,00
2015	Maluku Tenggara Barat	Rp 670.575.355.567,21
2015	Maluku Tenggara	Rp 612.434.551.501
2014	Seram Bagian Barat	Rp 569.292.005,11
2015	Maluku Barat Daya	Rp 671.737.040.931,00
2015	Buru Selatan	Rp 536.142.858.589
2015	Buru	Rp 554.010.688,01
2015	Kepulauan Aru	Rp 643.251.001.043
2014	Seram Bagian Timur	Rp
2015	Kota Tual	Rp 439.870.458.181,00
2015	Kota Ambon	Rp 736.046.709.531

Sumber: BPS Prop. Maluku, 2016

Dapat kita lihat bahwa dana perimbangan yang di berikan pemerintah pusat kepada kabupaten/kota provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah adalah daerah yang paling banyak menerima dana perimbangan. Table 4.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2014 kabupaten maluku tengah menerima dana perimbangan dari pemerintah sebanyak Rp.989.281.848.169,00.

B. Analisis SWOT

a. Analisa Internal Penerimaan PAD Kabupaten Maluku Tengah

Analisa internal dalam penerimaan PAD akan melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Maluku Tengah dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD. Faktor ini bersumber dari dalam lingkungan pemerintahan baik itu berupa kebijakan, sarana prasarana, SDM dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah data dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan PAD.

1. Kekuatan:

- Adanya Perda yang mengatur jumlah dan mekanisme pembayaran pajak, retribusi dan pembayaran lainnya.
- Data tentang kekayaan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Maluku Tengah yang bila dikembangkan dan diolah dapat menjadi pemasukan bagi pendapatan daerah.
- Bantuan kerjasama lintas instansi dalam usaha penerimaan PAD. Sumber PAD yang berasal dari berbagai sumber memungkinkan untuk diadakan kerjasama dengan instansi lainnya.
- Sistem transportasi yang semakin lancar dalam mobilitas ekonomi antar daerah/antar wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan ibu kota Propinsi yaitu Ambon dan daerah-daerah sekitarnya..

- Adanya pengawasan terhadap pengelolaan dan penerimaan terhadap PAD Maluku Tengah.

2. Kelemahan:

- Penetapan sanksi dalam setiap pelanggaran dalam kegiatan melaksanakan penerimaan PAD yang belum maksimal. Perda yang telah dibuat sudah dipublikasikan tetapi jumlah pelanggaran terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi masih sering terjadi dan belum mendapat sanksi yang tegas.
- Kurang perhatiannya pemerintah terhadap wajib pajak skala kecil. Ada kecenderungan bahwa pemerintah kurang memperhatikan pajak dalam skala yang kecil dan lebih fokus pada wajib pajak yang besar.
- kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan penerimaan PAD. Sarana dan prasarana infrastruktur yang terkait dengan usaha penerimaan PAD
- Sistem pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal. Sumber daya manusia pengelola PAD yang masih kurang, baik secara kualitas maupun kuantitas.

C. IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

Setelah melakukan faktor identifikasi internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), maka langkah selanjutnya adalah menyusun tabel faktor strategi internal (IFAS) dan memberi bobot (0,00-1,00) dan rating (1-4). Skala bobot masing-masing faktor dimulai dari 0,00 (tidak penting) sampai 1,00 (paling penting). Skala ranting dimulai dari 1 (poor) samapi 4 (outstanding), berdasarkan kekuatan dan kelemahan pada Kabupaten Maluku Tengah. Bobot dan ranting kemudian dikalikan lalu dijumlahkan untuk mendapatkan total skor dari tabel IFAS.

Berikut ini tabel 4.3 hasil analisa SWOT terhadap faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan.

Tabel 4.4

IFAS (Internal Factor Analysis Summary) Penerimaan PAD Kabupaten Maluku Tengah

NO	PERTANYAAN	BOBOT	RATING	SKOR
A	KEKUATAN			
1	Terdapat Perda yang mengatur penerimaan PAD	0.15	4	0,6
2	Adanya keterlibatan dan kerjasama dengan beberapa instansi dalam penerimaan PAD	0.05	3	0,15
3	keberadaan data potensi daerah	0.10	3	0,3
4	Sistem transportasi yang sudah mulai dikembangkan	0.05	3	0,15
	Adanya pengawas pemerintah terhadap pengelolaan PAD	0.10	3	0,3

B	KELEMAHAN			
1	Terdapat keterbatasan tenaga operasional dalam penerimaan PAD	0.10	3	0,3
2	Belum mampu menetapkan sanksi	0.10	3	0,3
3	Kurang perhatian terhadap wajib pajak/retribusi	0.10	3	0,3
4	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan PAD	0.10	4	0,4
5	SDM yang bertugas untuk mengelola penerimaan PAD memiliki kemampuan dan kompetensi	0.05	4	0,2
6	Sistem pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal	0.10	4	0,4
	TOTAL	1		3,4

(Sumber: Data Olahan, 2016)

a. Data dari sisi kekuatan menunjukkan :

1. Terdapat Perda yang mengatur penerimaan PAD diberi bobot tertinggi 0,15 diberi rating 4 karena peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah ada dan dapat dilihat sebagai berikut:
2. Adanya keterlibatan dan kerjasama dengan beberapa instansi dalam penerimaan PAD diberi bobot 0,10 di beri rating 3
3. Keberadaan data potensi daerah, diberi bobot 0,10 di beri rating 2
4. Sistem transportasi yang sudah mulai dikembangkan diberi bobot 0,10 di beri rating 3.
5. Adanya pengawas pemerintah terhadap pengelolaan PAD diberi bobot 0,10 di beri rating 3.

b. Data dari sisi kelemahan menunjukkan

1. Terdapat keterbatasan tenaga operasional dalam penerimaan PAD, diberi bobot 0,10 di beri rating 3.
2. Belum mampu menetapkan sanksi, diberi bobot 0,10 di beri rating 3. Belum mampu

menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang lalai terhadap kewajibannya.

3. Kurang perhatian terhadap wajib pajak/retribusi, diberi bobot 0,10 di beri rating 3. Kurangnya intervensi pemerintah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah membuat para wajib pajak khususnya dari skala UMKM inipun menjadi minim kesadaran pajaknya.
4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan PAD diberi bobot terendah 0,10 di beri rating 4.
5. SDM yang bertugas untuk mengelola penerimaan PAD memiliki kemampuan dan kompetensi diberi bobot terendah 0,05 karena SDM yang bertugas mengelola PAD belum terlalu memiliki kompetensi dalam meningkatkan atau mengelola potensi-potensi daerah. Pemberian rating untuk SDM yang bertugas untuk mengelola penerimaan PAD diberi rating 4.
6. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal, diberi bobot 0,10 di beri rating 4.

Table 4.7 APBD Kabupaten Maluku Tengah

Uraian	2014
Realisasi Penerimaan (Milyar Rp)	1.046,079
PAD (Milyar Rp)	50.996
Dana perimbangan (Milyar Rp)	989.281
Lain - Lain (Milyar Rp)	5.801
Realisasi Pengeluaran (Milyar Rp)	1.093,199

Sumber: Dinas PPKAD Kab. Maluku Tengah

Pada tahun 2014, dari total APBD sebesar 1.046 milyar, Sumbangan PAD sebesar 50 milyar atau sekitar 4,87 persen; sementara Dana Perimbangan menyumbang sekitar 989 milyar rupiah

atau hampir sekitar 94,57 persen dari total APBD; Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, 5 milyar atau setara dengan 0,56 persen. Untuk membiayai pembangunan, pemerintah Kabupaten Maluku

Tengah pada tahun 2014 menghabiskan anggaran sekitar 1.093 milyar rupiah seperti yang tercatat pada realisasi APBD kabupaten tersebut dengan rincian sebesar 81,06 persen digunakan untuk Belanja Operasional; 18,84 persen untuk Belanja Modal; dan 0.1 persen digunakan untuk Belanja Tak Terduga.

D. Analisa Eksternal Penerimaan PAD Kabupaten Maluku Tengah

Analisa eksternal dalam penerimaan PAD akan melihat peluang dan ancaman yang dimiliki pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD. Faktor eksternal ini bersumber dari lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah seperti terkait dengan objek pajak, peningkatan SDM melalui pelatihan, perkembangan teknologi dan informasi.

Berdasarkan hasil analisa dan wawancara dapat diketahui bahwa peluang yang dimiliki dalam meningkatkan PAD adalah:

1. Adanya kesempatan diklat dan pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan pegawai pengelola penerimaan PAD.
2. Letak Kabupaten Maluku Tengah yang strategis yang menghubungkan antara kabupaten-kabupaten dengan kota Ambon sebagai ibu kota provinsi.
3. Kesadaran wajib pajak di Kabupaten Maluku Tengah untuk membayar pajak tepat waktu.
4. Masih terdapat potensi yang dapat digali menjadi objek pajak yang baru di beberapa sektor seperti perikanan, perkebunan dan transportasi.
5. Kemajuan teknologi informasi membantu mempermudah pekerjaan terkait dalam penerimaan PAD..

6. Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tengah baik melalui kelahiran dan migrasi.

Sedangkan ancaman yang dihadapi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait dalam upaya peningkatan PAD. Ancaman tersebut antara lain:

1. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang disebabkan karena dana pengelolaan pajak yang tidak jelas dan tidak transparan sehingga masyarakat tidak merasakan langsung dampak terhadap pelaksanaan kegiatan pembayaran pajak.
2. Instabilitas keamanan yang berdampak berkurangnya investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Maluku Tengah.
3. Keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak tentang jumlah pajak yang harus dibayarkan karena jumlahnya relatif banyak.
4. Adanya usaha menghindari melakukan pembayaran pajak dikarenakan berbagai hal seperti keuntungan yang diperoleh tidak maksimal, ingin memperoleh keuntungan yang besar dengan tidak membayar pajak.
5. Perkembangan politik dan perekonomian yang tidak stabil yang mengakibatkan harga barang naik juga mempengaruhi terhadap kondisi usaha yang dilakukan wajib pajak sehingga pembayaran pajak juga mengalami hambatan dan gangguan karena hal tersebut.

E. EFAS (External Factor Analysis Summary)

Pembuatan tabel EFA dengan pemberian bobot dan ranting sama dengan tabel IFAS. Skala bobot masing-masing faktor dimulai dari 0.00 (tidak penting) sampai 1,00 (paling penting).

Tabel 4.8
Analisa Eksternal Penerimaan PAD Kabupaten Maluku Tengah

NO	PERTANYAAN	Bobot	Rating	Skor
A	PELUANG			
1	Banyaknya kesempatan diklat pegawai pengelola penerima PAD	0,10	2	0,2
2	Berada pada daerah yang strategis	0,10	3	0,3
3	Masih ada objek pajak/retribusi yang belum tergali secara optimal	0,10	4	0,4
4	Teknologi informasi yang berkembang	0,10	3	0,3
5	Perkembangan jumlah penduduk	0,15	4	0,6
B	ANCAMAN			
1	Krisis kepercayaan terhadap Pemda	0,10	3	0,3
2	Instabilitas keamanan	0,05	3	0,15
3	Keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi	0,10	3	0,3
4	Penghindaran pembayaran pajak/retribusi oleh wajib	0,05	3	0,15

	pajak/retribusi			
5	Perkembangan politik dan ekonomi	0,15	2	0,3
	TOTAL PELUANG-ANCAMAN	1		3,0

(Sumber: Data olahan, 2016)

a. Data dari sisi peluang menunjukkan

1. Banyaknya kesempatan diklat pegawai pengelola penerima PAD memiliki bobot 0,10 dan rating 2.
2. Berada pada daerah yang strategis memiliki bobot 0,10 dan rating 3.
3. Masih ada objek pajak/retribusi yang belum tergali secara optimal memiliki bobot 0,10 dan rating 4.
4. Teknologi informasi yang berkembang memiliki bobot 0,10 dan rating 3.
5. Perkembangan jumlah penduduk memiliki bobot 0,10 dan rating 4.

b. Data dari sisi ancaman menunjukkan

1. Krisis kepercayaan terhadap Pemda memiliki bobot 0,10 dan rating 3
2. Instabilitas keamanan memiliki bobot 0,05 dan rating 3.
3. Keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi memiliki bobot 0,10 dan rating 3.
4. Penghindaran pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi memiliki bobot 0,05 dan rating 3.
5. Perkembangan politik dan ekonomi memiliki bobot 0,15 dan rating 2.

F. Matriks Internal – Eksternal

Gambar 4.1
Total Skor IFAS Kabupaten Maluku Tengah

Total Skor EFAS Kabupaten Maluku Tengah	TINGGI 3,0	I Pertumbuhan (Urgen)	II Pertumbuhan (Urgen)	III Penciutan (Tidak Urgen)
	MENENGAH 2,0	VI Stabilitas (Urgen)	V Pertumbuhan Stabilitas (Urgen)	IV Penciutan (Tidak Urgen)
	RENDAH 1,0	VII Pertumbuhan (Urgen)	VIII Pertumbuhan (Urgen)	IX Likuiditas (Tidak Urgen)

Dari total skor IFAS dan EFAS kemudia dipetakan ke dalam Matriks Internal – Eksternal untuk melihat posisi strategisnya.

Gambar pada 4.1 menunjukkan bahwa keadaan Kabupaten Maluku Tengah berada pada kuadran I yaitu pertumbuhan. Strategi pertumbuhan yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah meningkatkan penerimaan PAD dengan menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi yang harus dilakukan adalah meminimalkan masalah-masalah internal guna memperoleh peluang yang ada sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan PAD.

**G. Strategi Peningkatan Penerimaan PAD
Kabupaten Maluku Tengah**

Berdasarkan tabel matrix analisis SWOT tersebut, maka strategi peningkatan penerimaan PAD

di Kabupaten Maluku Tengah dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menambah dan meningkatkan kemampuan tenaga operasional yang berkualitas di lapangan
2. Memanfaatkan peran dan kerjasama instansi terkait dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan PAD
3. Menjalankan peraturan terkait dengan penerimaan PAD dengan tegas termasuk pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran
4. Mengkaji kekurangan dan memaksimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatkan dukungan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung penerimaan PAD
6. Menggali potensi kemungkinan adanya objek pajak/retribusi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah dan Solihin (2001), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Agungwijaya (2012), *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Dan Pemerintah Kota Yogyakarta Dilihat Dari Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009-2010*. Download Publikasi.pdf. html 13 juli 2016
- Supriyadi (2013), *Analisis Desentralisasi Fiscal Di Kabupaten Bungo*. Download pdf.Jurnal Perspektif Pembiayaan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1, Juli 2016.
- Soeparmoko (2002), *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah Edisi Pertama*, Penerbit Andi, Jakarta.
- Yuliana (2013), *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Ditinjau Dari Rasio Keuangan*. Download pdf. 02._Naskah_publicasi.html 13 juli 2016
- Hasanusi (2015), *Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat*. Download pdf. drshasanusi@yahoo.co.id . html 13 juli 2016.
- Kabupaten-Maluku-Tengah-Dalam-Angka-2016 <http://malukutengah.kab.bps.go.id/html> 13 september 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Pendapatan Regional Kabupaten Maluku Tengah 2014*. <http://malukutengahkab.bps.go.id/>. html 13 september 2016.
- Kuncoro, Mudrajat, 1995. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Prisma No. 4 : 3 – 17, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2000, *Implikasi APBN dan APBD dalam Konteks Otonomi Daerah*, Kompak, No. 23, 573 – 587.
- Rangkuti, F., 2000. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Maluku Tengah Dalam Angka 2015*. <http://malukutengahkab.bps.go.id/>. html 1 Oktober 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Maluku Tengah Dalam Angka 2014* <http://malukutengahkab.bps.go.id/>. html 1 oktober 2016.
- Statistik Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2016. *Statistik-Daerah-Kabupaten-Maluku-Tengah-2016* <http://malukutengahkab.bps.go.id/html> 3 oktober 2016.
- Administrator, 04 Oktober 2013, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, <http://maltengkab.go.id> Maluku Tengah 2017